



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2017 - 2018.
Masa Persidangan ke	: III (Tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: <b>Kepala Perpustakaan RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Rabu, 17 Januari 2018.</b>
Pukul	: <b>10.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI dan Dr. Abdul Fiqri Faqih, MM./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa S.Sos./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017;</b> <b>2. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2018;</b> <b>3. Program Pengembangan Budaya Gemar Membaca; dan</b> <b>4. Lain-lain.</b>
Hadir	: 40 orang dari 52 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Muhammad Syarif Bando/Kepala Perpustakaan RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.30 WIB oleh DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Kepala Perpustakaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

**II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.**

**A. Evaluasi Pelaksanaan dan Daya Serap APBN 2017**

1. Realisasi daya serap APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 per 10 Januari 2018 sebesar 95,65% berdasarkan Surat Pengesahan DIPA (SP-DIPA)-057.01-0/2017) Tahun 2017 sebesar Rp.563.81miliar, tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp. 50.75.miliar, dan pagu anggaran APBNP

- a. Kepala Perpustakaan Nasional Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pengelola APBN Tahun 2018 untuk: 12 (dua belas) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat dan 34 (tiga puluh empat) Pengelola Dekonsentrasi pada Dinas Perpustakaan Provinsi.
  - b. Telah melaksanakan pengumuman pengadaan barang/jasa melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
  - c. Mempercepat Proses Lelang pada Triwulan I Tahun 2018.
  - d. Kepala Perpustakaan Nasional Mengeluarkan Kebijakan tidak boleh adanya rangkap jabatan antara pengelola keuangan dengan pejabat fungsional khususnya pustakawan agar fokus dengan tugas masing-masing
  - e. Tagline tahun 2018 adalah "Pustakawan Bergerak" dalam rangka mobilisasi ilmu pengetahuan.
3. Perpustakaan RI menyatakan kesiapan dan memastikan penyerapan APBN TA 2018 dapat lebih optimal dan tepat waktu.

**C. Program dan Kegiatan Prioritas Nasional dan Lembaga Dalam Rangka Pengembangan Budaya Gemar Membaca**

1. Dalam Program Pengembangan Budaya Gemar Membaca, Perpustakaan RI mencanangkan tagline **Pustakawan Bergerak** melalui mobilisasi pengetahuan, untuk memastikan setiap individu mendapat pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi diri dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Sebagai bagian dari mobilisasi pengetahuan, Perpustakaan RI melaksanakan 3 arahan Presiden RI dalam Pembukaan Gedung Layanan Perpustakaan RI sebagai berikut:
  - a. Pemusatan Langganan e-Journal Pendidikan Tinggi;
  - b. Literasi dan Budaya baca; dan
  - c. Dapat menggunakan Dana Desa untuk Perpustakaan Desa (Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Perpustakaan Desa) sebagaimana diatur dalam Permendes No.19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

**D. Sikap dan Pandangan Komisi X DPR RI adalah sebagai berikut:**

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi langkah antisipasi terhadap permasalahan APBNP 2017 dan langkah awal dalam mempersiapkan pelaksanaan APBN 2018.
2. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI agar melakukan koordinasi dengan Menristekdikti terkait masih adanya sekitar 892 Perguruan Tinggi yang belum mempunyai Perpustakaan.
3. Komisi X DPR RI mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kemenkeu RI untuk mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan, mengingat lembaga perpustakaan provinsi, kabupaten, dan kota dinaikkan statusnya setara dengan dinas pendidikan sebagai urusan wajib.

Perpustakaan Nasional Tahun 2017 sebesar Rp.614.56miliar lebih rendah 2,85.% dari target yang dicanangkan sebesar 98.5%.

2. Daya Serap berdasarkan Program, yaitu:

<b>Program Prioritas</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>Sisa Dana</b>	<b>%</b>
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	Rp169,6M	Rp.156,9M	Rp. 12,6M	92.55%
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	Rp3,82M	Rp. 3,7M	Rp.33,9Jt	99.11%
c. Program Pengembangan Perpustakaan	Rp441,129M	Rp.427M	Rp.14M	96.81%
<b>Total</b>	<b>Rp614,56M</b>	<b>Rp.587,8M</b>	<b>Rp.26,7M</b>	<b>95.65%</b>

3. Permasalahan APBNP 2017 disebabkan karena kurang efektifnya koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berada di Kemenkeu RI; dan kekurangan SDM pengelola Barang Milik Negara (BMN) sehingga dalam pengelolaan aset terdapat hambatan.

#### **B. Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan APBN TA 2018**

1. Kepala Perpustakaan RI menyampaikan bahwa pelaksanaan APBN 2018 berdasarkan kegiatan sebagai berikut:

<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Jumlah</b>
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	Rp.181,75M
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	Rp.3,852M
Program Pengembangan Perpustakaan	Rp.399,33M
<b>Total</b>	<b>Rp.584,933M</b>

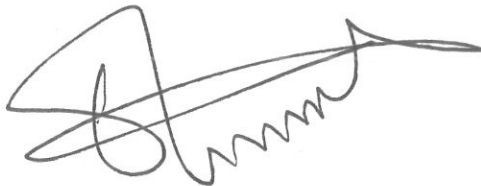
2. Langkah awal yang dilakukan oleh Perpustakaan RI dalam rangka efektifitas dan efisiensi kesiapan APBN 2018 sebagai berikut:

4. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk memiliki target optimal agar tingkat dan akses terhadap literasi untuk masyarakat Indonesia meningkat.
5. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk membuat target sasaran prioritas untuk meningkatkan minat baca dan indeks literasi.
6. Komisi X DPR RI mendorong Perpustakaan RI untuk menyediakan variasi jenis maupun judul buku bacaan yang lebih banyak, termasuk media informasi seperti film ataupun buku digital dalam fasilitas mobil keliling.
7. Komisi X DPR RI mendukung usulan dari Perpustakaan RI terkait penambahan anggaran sebesar Rp.323.92M sesuai dengan Surat Perpustakaan RI No. 511/1/PRC.03.00/1.2018 tanggal 12 Januari 2018 kepada Menteri Keuangan RI perihal usulan tambahan anggaran TA 2018.
8. Komisi X DPR RI meminta Perpustakaan RI untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lambat pada tanggal 22 Februari 2018 terhadap permasalahan yang disampaikan dalam pengantar rapat, dan seluruh tanggapan/masukan/pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14:30 WIB

**KEPALA PERPUSTAKAS RI**



**MUHAMMAD SYARIF BANDO**

**KETUA RAPAT,**



**DR. IR. DJOKO UDIANTO, M.M.**